



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : RSUD KOTA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRIYANTA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 888943

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 430.148.000

1. Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 872114 m2/114 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 70.548.000
3. Tanah Seluas 1375 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp.
75.000.000
4. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp.
45.000.000
5. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 21.000.000
7. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 28.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA 100 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 D (KARISMA) Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 (SUPRA X 125) Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000



4. LAINNYA, GAZELLE SEPEDA ONTEL Tahun 1974, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	982.482
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	483.230.482
III. HUTANG	Rp.	230.998.570
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	252.231.912

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.